

Daftar Pustaka

A. Buku :

- Adiwinata, Saleh, *Pengertian Hukum Adat menurut Undang – Undang Pokok Agraria*, Bandung: Alumni, 1980.
- Asis Safioedin, dan R.Soetojo, *Hukum Orang dan keluarga*, Cet.4, Bandung, penerbit Alumni,1972.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya di Indonesia*, Bandung : Alumni, 1980.
- Daiyo, J.B., *Pengantar Ilmu Hukum*, Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta : PT. Prenahlindo, 2001.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Syarif, *Hukum Perkawinan dan keluarga di Indonesia*, Cetakan ke 2, Jakarta : Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2004.
- Hadjon M. Philipus, et.al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cetakan Ketujuh, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2001.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Cetakan kedua. Bandung : Alumni, 1986.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Cetakan Ketujuh.Jakarta : Djembatan, 1997
- Hasan, Mustofa *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2011.
- Komariah, *Hukum Perdata Edisi Revisi*, Malang, UMM Press,2001.
- Latumeten, Pieter E. *Problema Kenotariatan, Renvoi* -September 2003.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung : Alumni, 1982.
- Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Jual Beli*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2003.
- Parlindungan, A.P., *Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria dan Tata Cara Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Bandung : Alumni.

- Perangin-Angin, Effendi, *Praktek Jual Beli Tanah*, Jakarta : CV. Rajawali, 1987.
- Poerdarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1992.
- Qaedhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*, Terjemahan, Indonesia : PT. Bina Ilmu, 1993
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* .Cet.VI, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Ramadhany, Siti Hafisah, *Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas Terhadap Harta Anak Dibawah Umur (Study Mengenal Eksistensi Balai Harta Peninggalan Medan Sebagai Wali Pengawas*, Tesis,Sps-USU, Medan 2004).
- Redaksi RAS. *Tip Hukum Praktis : Tanah dan Bangunan*. Depok : Raih Asa Sukses,2009.
- Sarjono, R., *Masalah Perceraian*. Cet 1 Jakarta, ,Academika, 1979
- Sjarif, Surini Ahlan dan Darmabrata, Wahyono, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*, cet,2, Jakarta, Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2004 .
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*. Jakata : Rajawali, 1983.
- Subekti, *Pokok – Pokok Dari Hukum Perdata*,Cet.9, Makassar, PT. Pembimbing Masa 1953.
- . *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1975.
- . *Hukum Perjanjian*. Cetakan Kesembilanbelas. Jakarta : Intermasa, 2002.
- Subekti, R, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Bandung : PT. Intermasa, 2003.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum keluarga Islam di Keluarga Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2001.
- Sutedi, SH, MH, Adrian *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya* Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Dikeluarga Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2001.
- Wantjik Saleh, K, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1977.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan - Persetujuan Tertentu*, Jakarta : Sumur Bandung, 1981.

B. Peraturan Perundang – undangan :

Badan Pertanahan Nasional, *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006.

Badan Pertanahan Nasional, *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor : 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah* Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012.

Menteri Agraria dan Tata Ruang, *Surat Edaran No. 4/SE/I/2015 tentang batas usia dewasa dalam rangka pelayanan pertanahan*.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

-----, *Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59.

-----, *Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 52.

_____, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

_____, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

_____, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 477

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta : Pradnya Paramita, 2008.

Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Perda Kota Magelang No. 9 tahun 2010).

C. Jurnal :

Gunawan, Caroline. *Peranan PPAT dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Hak Milik*. Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Setiawan, Wawan. “Kedudukan dan Keberadaan Serta Fungsi dan Peranan Notaris sebagai Pejabat Umum dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Menurut Sistem Hukum Indonesia”, Makalah disampaikan dalam acara Forum *Upgrading dan Refreshing Course*, Surabaya, 22-23 Mei 1998.

D. Internet

Hasyim, Abdul Manan, *Hakim Mahkamah Syariah Propinsi Aceh*,
<http://www.idlo.int/DOCNews/240DOCF1.pdf>.
<http://www.bilvapeddia.com/2013/04/pengertian-jual-beli-dan-ruang.html>.